



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

**RENJA  
DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini menggambarkan Rencana Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2021 ini adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2021 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi bahan sesuai ketentuan perundangan.

Makassar, Juni 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MAKASSAR,



**Ir. Hj. Rusmayani Madjid, M.Sp**

Pangkat Pembina Tingkat I

NIP. 19650305 1990102 001

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	11
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA	24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA	28
BAB IV	PENUTUP	32
LAMPIRAN :		
Lampiran 1 : Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2019		
Lampiran 2 : Evaluasi Rencana kerja Tahun 2020 s/d Triwulan II		
Lampiran 3 : Rekapitulasi Renja Tahun 2021		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kota Makassar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja OPD (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolak ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dinas Pariwisata Kota Makassar yang menangani Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja OPD (Renja OPD), permendagri 86 Tahun 2017, dan permendagri 90 Tahun 2019 kemudian menyusun Rencana

Kerja (Renja) di bidang Pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja OPD (OPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja di bidang Pariwisata sebagai Penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Makassar.

## **1.2 Landasan Hukum.**

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-Kabupaten Gowa, maros, dan Pangkajene dan

- Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
  - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Normal 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 15) Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 16) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi OPD (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);



- 17) Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Event Kepariwisataaan pada Dinas Parwisata;
- 18) Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pantai Losari pada Dinas Pariwisata;
- 19) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019);
- 20) Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 91 Tahun 2019).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran. Rencana Kerja OPD dimaksudkan sebagai patokan RKA-OPD sehingga setiap kegiatan OPD menjadi jelas dan terarah, serta pencapaian sasaran dapat terukur, baik dari segi sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana. Dengan terukurnya outcome (hasil) dari kegiatan OPD mencerminkan kinerja suatu OPD.

Penyusunan Rencana Kerja bertujuan :

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi OPD.
- b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi OPD.
- c. Penyelarasan program dan kegiatan OPD dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi dan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Makassar disusun sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pariwisata, Proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;  
Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

#### 4.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan OPD

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

6. Pengembangan daerah terisolir,
  7. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD****2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 (Tahun Lalu)**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2019 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2019 meliputi 2 (dua) hal, pelaksanaan rencana program & kegiatan dan hasil rencana program & kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan tahun 2019 dapat diuraikan pada lampiran 1 (*menurut lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010*):

Dari lampiran 1, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2019 dapat kita lihat terbagi ke dalam tiga bagian penting yakni;

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Selama tahun 2019, Dinas Pariwisata Kota Makassar telah melaksanakan 10 program dan 79 kegiatan, terdiri dari 5 program



pendukung (36 kegiatan) dan 5 program utama (48 kegiatan). Realisasi total (program utama dan pendukung) rata-rata capaian target kinerja 136,99% dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**, sementara total realisasi rata-rata capaian anggaran sebesar 110,57% dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**.

Realisasi capaian target kinerja program utama adalah 152,63% dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi capaian target anggaran program utama sebesar 103,55% dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**. Untuk realisasi capaian target kinerja program pendukung adalah 121,35% dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi capaian target anggaran program pendukung sebesar 117,58% dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**.

Dari 5 program utama tersebut, 4 program masih berlanjut ke periode Renja 2020. 4 program utama yang masih berlanjut tersebut adalah : 1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan, 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Masih berlanjutnya 4 program utama tersebut karena masih sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 setelah hasil pemetaan. Sementara 1 program tidak dilanjutkan pada Renja berikutnya yakni Program Pengembangan Wisata Kuliner.

Untuk program-program penunjang/pendukung ada 5 program, hanya 2 program yang masih berlanjut ke Renja berikutnya dan 3 program tidak dilanjutkan. Adapun program yang terus dilanjutkan adalah : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sementara 3 program yang tidak berlanjut adalah : 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya

Aparatur, dan 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### 2.1.2 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2020 (Tahun Berjalan)

Selama tahun 2020, Dinas Pariwisata Kota Makassar melaksanakan 6 program dan 35 kegiatan, terdiri dari 2 program pendukung (20 kegiatan) dan 4 program utama (15 kegiatan). Realisasi total (program utama dan pendukung) rata-rata capaian target kinerja 40,37% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**, sementara total realisasi rata-rata capaian anggaran sebesar 26,55% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**. Adapun secara rinci evaluasi program utama dan pendukung sampai triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pencapaian kinerja program pengembangan destinasi pariwisata adalah: 1. Jumlah kelompok sadar wisata dengan target 5 kelompok dan terealisasi 0 kelompok dengan prosentase pencapain 0%, 2. Jumlah obyek wisata baru dengan target kinerja 1 OWB dan terealisasi 0 OWB dengan prosentase 0%, 3. Persentase obyek daya tarik wisata (ODTW) yang dikembangkan dengan target 5 % dan terealisasi 0 % dengan Prosentase 0%, 4. Jumlah obyek daya tarik wisata (ODTW) wilayah yang didukung/ difasilitasi menjadi destinasi wisata halal dengan target kinerja 1,25% dan terealisasi 0% dengan prosentase pencapain 0%, 5. Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola secara terpadu dengan target kinerja 1 kawasan dan terealisasi 1 kawasan dengan prosentase 100%, dan 6. Jumlah kemitraan usaha pariwisata dengan target kinerja 1 kawasan dan terealisasi 0 kawasan dengan prosentase 0%. Program ini memiliki anggaran setelah parsial 2 sebesar Rp. 1.797.604.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 485.600.000,- atau sekitar 14,51%. Sementara

realisasi rata-rata capain kinerja secara keseluruhan sebesar 24,00% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

## 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pencapaian kinerja program pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata adalah: 1. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dengan target 925.147 kunjungan dan terealisasi 0 kunjungan dengan prosentase 0%, 2. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan terget kinerja 18.484 kunjungan dan terealisasi 0 kunjungan dengan prosentase 0%, 3. Rata-rata lama kunjungan wisatawan dengan target kinerja 3 hari dan terealisasi 3 Hari dengan prosentase 100% , 4. Persentase PAD dari sektor pariwisata dengan target 29,32% dan terealisasi 0% dengan prosentase 0%, 5. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target kinerja 2,29% dan terealisasi 0% dengan prosentase 0%, dan 6. Jumlah Tourist Information Centre (TIC) dengan target kinerja 10 unit dan terealisasi 1 unit dengan prosentase 10%. Program ini memiliki anggaran setelah parsial 2 sebesar Rp. 1.778.784.000,- dengan realisasi sebesar Rp.530.597.000,- atau sekitar 7,71%. Sementara realisasi rata-rata capain kinerja secara keseluruhan sebesar 7,78% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

## 3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pencapaian kinerja program pengembangan kapasitas sumber daya manusia pariwisata adalah: 1. Indeks kepuasan wisatawan terhadap industri kepariwisataan dengan target kinerja skala 3 dan terealisasi skala 0 dengan prosentase 0%, 2. Persentase sumber daya manusia pariwisata yang bersertifikat dengan target 14,10% dan realisasi 0% dengan prosentase 0%, dan 3. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam promosi terhadap total pekerja

dengan target kinerja sebesar 2,25% dan terealisasi 0% dengan prosentase 0%. Program ini memiliki anggaran setelah parsial 2 sebesar Rp. 1.209.216.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 553.092.192,- atau sekitar 31,08%. Sementara realisasi rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 64,58% dengan kategori Rendah (R).

#### 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pencapaian kinerja program pengembangan ekonomi kreatif adalah: 1. Nilai produksi pelaku ekonomi kreatif dengan target kinerja sebesar Rp. 875.000.000,- dan terealisasi Rp. 0 dengan prosentase 0%, 2. Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif dengan target kinerja sebesar 189 Pelaku usaha dan terealisasi 0 pelaku dengan prosentase 0%, 3. Persentase pelaku ekonomi kreatif berbasis IPTEK dengan target kinerja 100% dan terealisasi 0% dengan prosentase 0%, dan 4. Jumlah kesepakatan pentaheliks dalam pembangunan ekosistem ekonomi kreatif dengan target kinerja 5 MoU dan terealisasi 0 MoU dengan prosentase sebesar 0%. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 391.356.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.230.000,- atau sekitar 1,22%. Sementara realisasi rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 2,08% dengan kategori Sangat Rendah (SR).

#### 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah 1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi 50% dengan prosentase pencapaian 50%, 2. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan

teralisasi 50% dengan prosentase pencapaian sebesar 50%, dan 3. Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50% dengan prosentase pencapaian sebesar 50%. Program ini memiliki anggaran setelah parsial 2 sebesar Rp. 2.643.152.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.006.179.698,- atau sekitar 44,96%. Sementara realisasi kinerja sebesar 50% dari target masing-masing sebesar 100%, dengan rata-rata capain kinerja secara keseluruhan sebesar 86,13% dengan kategori Tinggi (T).

#### 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian program peningkatan sarana dan prasaran aparaturnya adalah 1. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50% dengan prosentase pencapaian sebesar 50%, 2. Persentase sarana dan prasarana aparaturnya perangkat daerah dalam kondisi baik dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50% dengan prosentase pencapaian sebesar 50%, dan 3. Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas ASN perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 50% dengan prosentase pencapaian 50%. Program ini memiliki anggaran setelah parsial 2 sebesar Rp. 701.439.460,- dengan realisasi sebesar Rp. 341.583.700,- atau sekitar 24,24%. Sementara realisasi kinerja sebesar 50% dari target masing-masing kinerja sebesar 100%, dengan rata-rata capain kinerja secara keseluruhan sebesar 59,75% dengan kategori Rendah (R).

Dari 4 program utama tersebut semuanya berlanjut ke periode RKPD berikutnya. Empat program utama yang masih berlanjut tersebut adalah: 1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2) Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan, dan 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Masih berlanjutnya 4 program utama tersebut karena dari hasil pemetaan program kegiatan yang sesuai dengan permendagri 90 tahun 2019, 4 program tersebut masih sesuai untuk dilanjutkan.

Sementara untuk program-program penunjang/pendukung juga mengalami perubahan di RKPD berikutnya, dari 2 program pendukung yang dilaksanakan di tahun 2020 hanya 1 program yang terus berlanjut di Renja berikutnya (tahun 2021), yakni : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, untuk lebih jelas dapat dilihat di lampiran 2 dan 3.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2021 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut: a) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, b) Tujuan yang dikehendaki, c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, dan d) Kebijakan untuk melaksanakannya. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk tahun 2021 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 (tahun lalu) dan hasil evaluasi capain kinerja tahun 2020 (tahun berjalan) sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2021;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Berdasarkan lampiran 1 lampiran 2, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat

kita lihat, tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi bahkan ada program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Keterbatasan anggaran dan kebijakan sebagai dampak dari wabah Virus korona (COVID-19) merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan Dinas Pariwisata Kota Makassar tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Namun secara keseluruhan dari lampiran 1 dan 2 dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar sampai tahun 2019 (lampiran 1) terealisasi diatas rata-rata. Namun di tahun 2020 (lampiran 2) terealisasi dibawah rata-rata.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Kota Makassar maka indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program dan kegiatan adalah;

1. Meningkatnya daya tarik wisata dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara;
2. Meningkatnya daya saing wisata dengan indikator lama tinggal wisatawan; dan
3. Meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator persentase PAD dari sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2020 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada kegiatan yang dananya bersumber dari R-APBD di luar belanja tidak langsung. Dengan memperhatikan Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Berdasarkan Tabel 2.1, dari 3 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, satu indikator tercapai 100% dan 2 indikator masih belum ada capaiannya (0%).

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata**  
**Kota Makassar**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja OPD Tahun 2020	Realisasi Capaian Triwulan I s/d II	Proyeksi Tahun 2020	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)		(15)
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara			5%	0	1%	
	Persentase Peningkatan Pergerakan Wisatawan Nusantara			2%	0	0,15%	
2	Lama Tinggal Wisatawan			3 Hari	2-3 Hari	3 Hari	
3	Persentase PAD dari Sektor Pariwisata			29,32		5,25%	

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi;

- a. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan



- pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- b. Mengelola Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata;
  - c. Menetapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - d. Melakukan pemasaran pariwisata;
  - e. Menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
  - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, terdapat beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor Pariwisata, yang harus menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan peran pembangunan Pariwisata di wilayah Kota Makassar. Isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

#### **1. Belum optimalnya dampak promosi dan pemasaran pariwisata**

Upaya promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan selama ini terlihat belum berdampak signifikan karena pemanfaatan media promosi yang belum optimal sehingga promosi serta informasi pariwisata yang ingin disampaikan pun tidak dapat dijangkau secara luas oleh para wisatawan. Selain itu pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan baik yang berskala lokal, nasional dan internasional yang dilaksanakan tidak diawali dengan perencanaan yang matang sehingga konten yang disajikan kurang menarik, selain itu kegiatan yang dilaksanakan kurang variatif dan beragam sehingga tujuan utama

pelaksanaan kegiatan tersebut yakni meningkatkan angka kunjungan wisatawan menjadi sulit terwujud.

## **2. Rendahnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata**

Kota Makassar memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam, baik pantai, pulau, sungai, kuliner, hiburan dan lain sebagainya. Keragaman daya tarik wisata yang ada saat ini tentu membutuhkan sarana dan prasana pendukung dalam pemanfaatannya. Masih rendahnya kualitas aksesibilitas tentu akan mempengaruhi kemampuan wisatawan untuk menjangkau destinasi pariwisata yang ada, selain itu masih terbatasnya sarana akomodasi yang ada pada destinasi menjadi masalah tersendiri yang harus dapat dipecahkan secara bersama, karena ketersediaan sarana dan prasarana pada daya tarik wisata tentu akan mempengaruhi angka kunjungan wisatawan.

## **3. Masih rendahnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya**

Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sampai dengan terbentuknya kementerian baru yang mengurus ekonomi kreatif secara khusus, yaitu Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah menjadi sektor baru dalam menggerakkan perekonomian Negara. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata bahwa pada periode 2002-2010, ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam nilai tambah atau PDB, penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan maupun ekspor. Kontribusi rata-rata PDB tahun 2002-2010 terhadap PDB nasional mencapai 7,74%, tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 7,76%, kontribusi jumlah usaha mencapai 6,77%, kontribusi ekspor mencapai 9,77% dengan kontribusi impor hanya sebesar 1,3%, dan net trade

barang sebesar 33,14%. Dengan melihat data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif menjadi sebuah keniscayaan, data tersebut menjadi sebuah peluang bagi kota Makassar yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan sekaligus menjadi sebuah tantangan khususnya bagi Dinas Pariwisata yang baru saja dibentuk agar mampu memberikan intervensi program dan kegiatan yang efektif dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

#### **4. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM Pariwisata**

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*) serta tidak jelasnya uraian tugas masing-masing staf membuat pembagian tugas menjadi tidak jelas sehingga pekerjaan masih bertumpuk pada beberapa orang staf saja.

#### **5. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan**

Kemitraan dan kerjasama Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Isu-isu strategis tersebut, jika tidak diantisipasi saat ini akan

berdampak terhadap pencapaian tujuan dan fungsi Dinas Pariwisata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pariwisata Kota Makassar telah menyiapkan 4 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan dapat mengelola daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata kabupaten/kota, dan menetapkan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diharapkan dapat melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menyediakan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2014-2019, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Makassar.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2021 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

No	Tujuan RKPD 2021	Sasaran RKPD 2021
1	Meningkatkan kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/prasarana perkotaan Kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau	Meningkatnya kapasitas infrastruktur kemaritiman, sarana/prasarana perkotaan Kawasan pesisir, dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pulau-pulau
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa
3	Melindungi golongan masyarakat lapis bawah	Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah
4	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
5	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Kehidupan Kota yang nyaman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dalam menjamin Kehidupan Kota yang nyaman
7	Memelihara Ketertiban dan Ketentraman dalam menjamin kehidupan Kota yang nyaman	Terpeliharanya Ketertiban dan Ketentraman dalam menjamin kehidupan Kota yang nyaman
8	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas Kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan	Berkembangnya infrastruktur dan fasilitas Kota yang mendorong literasi warga kota dalam wawasan masa depan
9	Mengembangkan apresiasi Budaya, Kehidupan beragama dan Harmoni sosial dalam Kehidupan Kemasyarakatan	Berkembangnya apresiasi Budaya, Kehidupan beragama dan Harmoni sosial dalam Kehidupan Kemasyarakatan
10	Mengembangkan Kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Berkembangnya Kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan

Arah kebijakan pembangunan sebagai urusan perencanaan daerah di Kota Makassar masih mengacu pada RPJP Kota Makassar Tahun 2005 s/d 2025. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Visi Kota Makassar 2025 adalah: **”Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”** sehingga untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk periode 2005-2020.

berdasarkan tabel 2.2 Arah kebijakan ekonomi Kota Makassar 2021 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maka Dinas pariwisata memiliki posisi dalam tujuan dan sasaran pembangunan di tujuan 2 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa dengan program prioritas Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sasaran ke-9) dalam RKPD Kota Makassar Tahun 2021.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota diuraikan pada tabel 2.3 berikut;

**Tabel. 2.3**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020**  
**Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2021**  
**Kota Makassar**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kota Makassar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3.26.05	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>				
3.26.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>				
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Kantor Lurah Gusung	Jumlah SDM Kepariwisataan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) yang mendapat pelatihan dasar	35 Orang	Terakomodir (Pelatihan Pembuatan Souvenir)
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	RW 001 Kelurahan Totaka	Jumlah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi	1 Kelompok	Tidak Diakomodir (Pengadaan Alat Kesenian dan



			Kreatif yang difasilitasi		Kebudayaan)
--	--	--	---------------------------	--	-------------

Berdasarkan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa kegiatan yang diusulkan di Musrenbang tahun 2020 ada yang dapat diakomodir dan ada yang tidak dapat diakomodir, kegiatan yang **dapat diakomodir** adalah: Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) dengan lokasi di Kantor Kelurahan Gusung, total jumlah peserta 35 orang dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000-.

Sementara kegiatan yang **tidak dapat diakomodir** adalah: Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, kegiatan ini tidak dapat diakomodir dengan alasan karena tidak kesesuaian sasaran kegiatan dalam dokumen perencanaan (Renja 2021), sasarannya adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif yang difasilitasi bukan pengadaan alat kesenia dan kebudayaan.

Sementara itu, berdasarkan pengendalian hasil musrenbang tahun 2019 yang pelaksanaan kegiatannya di tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel. 2.4**  
**Pengendalian Hasil Musrenbang Tahun 2019**  
**Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2020**  
**Dinas Pariwisata Kota Makassar**

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI USULAN	VOLUME	PENGUSUL	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN	TOTAL PESERTA	HASIL/OUTPUT
1	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan Pembuatan berbagai Jenis Kuliner bagi perempuan yang	30 Orang	kantor kelurahan gusung # KEL. GUSUNG # KEC. UJUNG TANAH	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	---		Kegiatan belum dilaksanakan karena pandemi global COVID 19

		produktif dan anggota PKK Seperti Pembuatan Abon Dan Bakso Ikan yang bahannya dari Bahan Hasil Laut. (ID: #9860)						
2	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	Sosialisasi Pembuatan Kue Tradisional DII (ID: #13012)	50 Orang	JL. DG. TANTU I RW.001 SAMPAI RW.005 KELURAHAN RAPPOKALLING # KEL. RAPPOKALLING # KEC. TALLO	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	---		Kegiatan belum dilaksanakan karena pandemi global COVID 19
3	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	Memberikan pelatihan dan keterampilan membuat kue tradisioanl bagi ibu rumah tangga. (ID: #13275)	60 Orang	Jln. Rappokalling Raya Lr. Kita 1 RW.01 s/d RW.06 # KEL. TAMMUA # KEC. TALLO	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	---		Kegiatan belum dilaksanakan karena pandemi global COVID 19
4	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pembinaan Usaha Kelompok Masyarakat Ekonomi Kreatif dan produktif (ID: #6966)	3 IKM	jalan Maccini Kidul # KEL. MACCINI # KEC. MAKASSAR	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	---		Kegiatan belum dilaksanakan karena pandemi global COVID 19
5	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	pelatihan pembuatan kue tradisional bagi ibu-ibu (ID: #13325)	25 Orang	jalan andi Tonro IV selatan RT 01 RW 01 # KEL. BONTODURI # KEC. TAMALATE	Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif	---		Kegiatan belum dilaksanakan karena pandemi global COVID 19
6	Pembangunan fasilitas pariwisata di Daya Tarik Wisata (DTW)	WAHANA MAINAN (ID: #14141)	5 Jenis	WISATA MANGROVE LANTEBUNG # KEL. BIRA # KEC. TAMALANREA	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	---		Kegiatan blm dilaksanakan karena pandemi global COVID 19

Berdasarkan tabel 2.4, semua usulan program dan kegiatan pemangku jabatan yang diakomodir hampir semuanya belum dilaksanakan karena adanya pandemi global COVID 19 yang juga berdampak di Kota Makassar sehingga kegiatan blm dilaksanakan sampai ditriwulan II tahun 2020.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

##### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Telaahan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif**

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra K/L
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	Masih Rendahnya fasilitas penunjang/amenitas pariwisata yang terbangun
2.	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata	Bukan menjadi Tugas dan Fungsi Dispar Kota Makassar
3.	Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang bersertifikasi Masih minim, masih dibawah 15% di tahun 2019
4.	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional	Tingkat persentase kontribusi pariwisata terhadap total PDRB masih rendah, dari tahun 2015 s/d 2019 kontribusi masih dibawah 2,4%
5.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman);	Tidak terdapat permasalahan

No.	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait dengan sasaran Renstra K/L
6.	Meningkatnya jumlah penerimaan devisa	Bukan menjadi Tugas dan Fungsi Dispar Kota Makassar
7.	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Tidak terdapat permasalahan
8.	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Tidak terdapat permasalahan
9.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata	Tidak terdapat permasalahan
10.	Meningkatnya pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	Bukan menjadi Tugas dan Fungsi Dispar Kota Makassar
11.	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Tidak terdapat permasalahan
12.	Nilai Ekspor Produk Kreatif	Bukan menjadi Tugas dan Fungsi Dispar Kota Makassar

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2014-2019, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Makassar.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2021 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 dengan berfokus pada misi 2 "Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi kota" dengan arah kebijakan yang berfokus pada :

1. Pengembangan pusat-pusat perniagaan dan fasilitas pendukung perdagangan, jasa dan pariwisata, pengembangan UMKM dan penguatan perusahaan daerah, serta pemantapan iklim investasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS secara terpadu melalui penanganan sektor informal perkotaan, pemberian jaminan sosial keluarga, dan peningkatan keterampilan anggota keluarga kurang mampu.

Melalui kebijakan ini, Pembangunan Makassar diarahkan untuk dapat memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota dengan berfokus pada sasaran :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa dengan indikator jumlah wisatawan domestik dan mancanegara
2. Terlindunginya golongan masyarakat lapis bawah dari kerentanan sosial dan ekonomi dengan indikator jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif dan nilai produksi pelaku ekonomi kreatif

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Kota Makassar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang promosi Pariwisata;
- c. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kegiatan pasar wisata daerah;
- d. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya dan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan usaha industri kepariwisataan;

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2020 adalah ***Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah.***

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk

dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata;
2. Meningkatnya Daya Saing; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2



**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun 2021
1	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata terhadap Total PDRB (%)			2,3%
			Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	5 %
				Persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara	5 %
			Meningkatnya Daya Saing Wisata	Lama tinggal wisatawan	3 Hari
			Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD dari sektor pariwisata	30 %

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

#### 4.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, maka disusunlah program-program Dinas Pariwisata untuk Tahun 2021 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target sasaran yang harus tercapai pada tahun 2021 dan berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada lampiran 3.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2021 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja yang telah disempurnakan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 Pemerintah Kota Makassar yang disusun dengan memperhatikan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Program Utama**

Program Dinas Pariwisata Kota Makassar yang terkait dengan Program Utama terdiri dari :

- **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
  1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
    - a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
    - a. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
- **Program Pemasaran Pariwisata dilakukan dengan kegiatan :**
  1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
  - b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
  - c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
- **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
- **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
    - c. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

#### **Program Pendukung**

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif antara lain :**
1. Administrasi Keuangan, dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Administrasi Umum, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
  - h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - i. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - j. Pengadaan Mebeleur
  - k. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - l. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
  - m. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
  - n. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
  - o. Pemeliharaan Ruitn/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
  - p. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
  - q. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam R-APBD Tahun Anggaran 2021, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan pada lampiran 3;

Berdasarkan lampiran 3 dapat diketahui bahwa total pagu yang dianggarkan pada Renja Tahun 2021 sebesar Rp. 19.314.571.710,- yang terdiri atas 4 program utama dan 1 program pendukung. Program utama terdiri dari 6 kegiatan dengan 11 sub kegiatan dan program pendukung terdiri atas 3 kegiatan dengan 24 sub kegiatan.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada RPJP 2020-2025, RPJMD Provinsi 2019-2024, SPM, dan SDGs Kota Makassar dan berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini terkait dengan kebijakan pokok Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 yang arah kebijakannya berfokus pada Peningkatan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah, Kebijakan ini kemudian dijabarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2021.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Makassar.

Program dan kegiatan indikatif yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 akan dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata Kota Makassar harus didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam mengimplementasikan Rencana Kerja ini.

Semoga rencana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ini dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang.









NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT/KEY/KEGIATAN (OUTPUT))	SATUAN KINERJA	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2014 s.d.2019 (Akhir Periode RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s.d. RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2019)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2019)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2019 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s.d. TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2019 (%)						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENSTRA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
2	02	11	17	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata	orang	600	1,000,000,000	300	454,905,322	300	500,000,000	396,210,000	-	-	-	100	42,995,000	200	353,093,700	300	396,088,700	100,00	99,97	600	850,994,022	100,00	85,10					
2	02	11	18	Pengawasan wajib sertifikasi kompetensi pariwisata	orang	8,500	1,550,000,000	7,311	574,206,000	4,500	800,000,000	518,344,000	-	-	150	243,405,000	200	66,850,000	-	182,077,000	350	492,332,000	7,78	94,98	7,661	1,066,538,000	90,13	68,81				
2	02	11	19	Sosialisasi standar kompetensi bidang pariwisata	Media	6	1,000,000,000	3	583,498,500	3	500,000,000	360,570,000	1	120,000,000	1	83,142,200	2	89,250,000	-	61,582,800	4	353,975,000	133,33	98,17	7	937,473,500	116,67	93,75				
2	02	11	20	Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata	Keg	6	1,000,000,000	3	423,820,000	3	500,000,000	355,985,200	-	-	-	3	340,912,300	-	-	3	340,912,300	100,00	95,77	6	764,732,300	100,00	76,47					
2	02	11	21	Belahan auditor dan asesor bidang pariwisata	Orang	50	1,000,000,000	23	273,684,800	25	500,000,000	283,752,000	-	-	24	264,996,300	-	-	-	11,959,000	24	276,955,300	96,00	97,60	47	550,640,100	94,00	55,06				
2	02	11	22	Koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata	Keg	10	800,000,000	4	291,912,000	6	500,000,000	341,700,000	-	-	1	89,254,000	-	-	4	248,003,000	5	337,257,000	83,33	98,70	9	629,169,000	90,00	78,65				
2	02	11	23	Facilitasi pemberdayaan kelembagaan profesi pariwisata	Keg	8	600,000,000	4	395,603,400	4	300,000,000	118,000,000	-	-	-	1	37,417,000	1	78,460,866	2	115,877,866	50,00	98,20	6	511,481,266	75,00	85,25					
2	02	11	24	Penyusunan indeks kepuasan pelanggan terhadap pelayanan industri pariwisata	Skala	2	1,000,000,000	4	460,823,100	1	500,000,000	390,125,000	-	90,000,000	-	123,796,100	-	-	394	168,788,400	4	382,584,500	394,00	98,07	8	843,407,600	397,00	84,34				
																				125,24	110,04			125,23	78,32							
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)			Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)						
2	02	12	PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA KULINER	Jumlah Kelompok Masyarakat Kuliner yang Dibina di Biringkanal	Kelompok	45	5,710,000,000	0	2,164,758,600	0	800,000,000	500,000,000	0	10,000,000	0	62,259,600	0	293,501,200	0	130,089,200	0	495,850,000	0	61,98	0	2,660,608,600	100,00	46,60				
2	02	12	06	Pembinaan Masyarakat di Biringkanal	orang	1,900	1,450,000,000	400	580,509,100	200	400,000,000	500,000,000	100	10,000,000	100	62,259,600	100	293,501,200	100	130,089,200	400	495,850,000	200,00	99,17	800	1,076,359,100	42,11	74,23				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	200,00	99,17			42,11	74,23						
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)			Sangat Rendah (SR)	Sedang (S)						
2	02	13	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah sarana prasarana DTW yang berdaya saing	%	8	16,900,040,780	4	12,265,648,200	1	2,900,000,000	6,421,200,000	0,00	387,100,000	0,00	734,316,724	0,00	846,124,200	4,00	2,850,914,476	4,00	4,018,455,500	400,00	138,57	8	16,284,103,700	100,00	96,36				
2	02	13	02	Pembinaan sarana prasarana dan fasilitas di daya tarik wisata	DTW	4	4,404,450,000	4	2,248,216,100	1	650,000,000	4,000,000,000	-	-	-	109,247,000	-	34,879,000	4	1,470,197,500	4	1,614,323,500	400,00	40,36	8	3,862,539,600	200,00	87,70				
2	02	13	04	Pengumpulan dan pengkajian data kunjungan wisatawan di DTW kota makassar	Kegiatan	8	600,000,000	4	399,980,000	4	300,000,000	275,000,000	1	77,700,000	1	58,199,000	1	98,837,000	1	38,664,000	4	273,400,000	100,00	99,42	8	673,380,000	100,00	112,23				
2	02	13	08	Updating data base usaha industri pariwisata	Dokumen	28	711,295,000	34	625,510,600	4	150,000,000	300,000,000	1	165,350,000	1	17,032,800	1	41,544,700	1	75,272,500	4	299,200,000	100,00	99,73	38	924,710,600	135,71	130,00				
2	02	13	09	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kewirausahaan pariwisata	Kegiatan	37	1,342,273,000	12	943,618,000	5	350,000,000	385,000,000	-	36,625,000	1	138,109,124	1	120,085,800	1	87,130,076	3	381,950,000	60,00	99,21	15	1,325,568,000	40,54	98,76				
2	02	13	10	Pengawasan dan pemantauan usaha industri pariwisata	Kegiatan	60	1,630,904,500	48	1,212,933,000	12	350,000,000	512,200,000	3	65,625,000	3	158,833,000	3	121,777,000	3	162,597,000	12	508,832,000	100,00	99,34	60	1,721,765,000	100,00	105,57				
2	02	13	11	Pembinaan dan penerbitan usaha industri pariwisata yang dilaksanakan	Kegiatan	46	2,443,296,000	30	1,548,397,300	10	550,000,000	495,000,000	2	41,800,000	3	161,638,000	3	141,380,000	2	142,732,000	10	487,550,000	100,00	98,49	40	2,035,947,300	86,96	83,33				
2	02	13	13	Fasilitasi pengembangan sertifikasi usaha pariwisata	Jumlah Usaha Industri pariwisata hotel dan penyediaan makanan minuman yang disertifikasi /di kelas flikasian	Jumlah Usaha	275	696,508,000	275	684,508,000	100	250,000,000	454,000,000	-	100	91,257,800	2	287,620,800	-	74,321,400	102	453,200,000	102,00	99,82	377	1,137,708,000	137,09	163,34				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	137,43	90,91			114,33	111,56						
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi (ST)	Tinggi (T)			Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	27,087,641,000	1,642,553,457	5,071,088,050	6,267,550,205	10,559,139,450	23,540,331,162										
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		136,99	140,67			99,72	93,52					
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)			Sangat Tinggi (ST)	Sangat Tinggi (ST)						

\* Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

1. Komitmen Kepala Dinas Pariwisata dalam mencapai peningkatan kinerja angka kunjungan wisatawan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2014 s.d 2019 (akhir Periode RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s.d RENJA SKPD TAHUN LALU (2018)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2019)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2019)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2019 (%)		REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD s.d TAHUN 2019 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s.d TAHUN 2019 (%)	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (RENSTRA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	4.a	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6+12	15 = 14/5*100%												

**\* Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Beberapa program dan kegiatan seperti indeks kepuasan dan pembenahan sarana kepariwisataan masih dalam proses sehingga kinerja belum dapat diukur

**\*Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :**

1. Kegiatan harus dapat terus dioptimalkan dalam upaya Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata

**\*Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :**

1. Program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan Dinas Pariwisata

Disusun,

Makassar, 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MAKASSAR

Ir. Hj. Rasmavani Madiid, M.SP  
Np. 19650305 199010 2 001

Dievaluasi,

Makassar, 2019

KEPALA BAPPEDA  
KOTA MAKASSAR

(\_\_\_\_\_)

**FORMULIR E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar**  
**Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar**  
**Periode Pelaksanaan : Tahun 2020**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANG GUNG JAWAB	KET		
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13		
2	2		URUSAN PILIHAN																				
2.02	2		Pariwisata																				
2.02	2	02 01	Dinas Pariwisata																				
2.02	2	02 01 01	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kelompok Sadat Wisata Kelompok	5			0	0						0.00		0.00						Indikator program dicapai di akhir tahun
				Jumlah Obyek Wisata Baru Objek	1			0	0						0.00		0.00						
				Persentase Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan %	5			0	0						0.00		0.00						
				Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) wilayah yang didukung/ difasilitasi menjadi destinasi wilayah halal %	1,25	3.346.804,000	1.797.604,000	0	258.150,000	0	227.450,000				0.00	485.600,000	0.00	14.51		DISPAR			
				Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola secara terpadu Kawasan	1			1	0						1.00		100.00						
				Jumlah kemitraan usaha pariwisata Kemitraan	1			0	0						0.00		0.00						
	2	02 01 01 02	Pembangunan Fasilitas Pariwisata di Daya Tarik Wisata	Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW) yang dibenhahi DTW	1	1,000,000,000	433,950,000	-	10,500,000	-	11,200,000				0	21,700,000	0.00	2.17				Indikator tercapai di akhir tahun	
	2	02 01 01 08	Pembentukan Kelompok Sadat Wisata	Jumlah kelompok sadat wisata Kelompok	10	300,000,000	73,400,000	2	34,400,000	-	-				2	34,400,000	20.00	11.47					
	2	02 01 01 10	Pengawasan dan Pemantauan Industri Pariwisata	Jumlah bidang usaha pariwisata yang dibenhahi Bidang	13	350,000,000	109,200,000	13	18,200,000	-	10,500,000					13	28,700,000	100.00	8.20				
	2	02 01 01 13	Pengelolaan UPT Pantai Losari	Kontribusi Destinasi Pantai Losari terhadap PAD Kota Makassar %	0.031	1,000,000,000	924,684,000	-	195,050,000	-	205,750,000				0	400,800,000	0.00	40.08				Indikator tercapai di akhir tahun	
	2	02 01 01 14	Pelatihan Pemandu Wisata, Homestay dan Tata Kelola Destinasi (DAK Non Fisik)	Jumlah peserta pelatihan Orang	305	696,804,000	256,370,000	-	-	-	-				0	-	0.00	0.00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																24.00	12.38						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)						
2.02	2	02 01 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Kunjungan	925,147			0	0						0		0.00						DISPAR
				Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Kunjungan	18,484			0	0						0		0.00						
				Rata-rata lama kunjungan wisatawan Hari	3	4.274.000,000	1.778.784,000	3	491.297,000	0	39,300,000				3	530,597,000	100.00	7.71					
				Persentase PAD dari sektor pariwisata %	29.32			0	0						0		0.00						

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANG GUNG JAWAB	KET
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	4.a	5			6	7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13	
			Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,29			0	0					0		0,00					
			Jumlah Tourist Information Centre (TIC)	Unit	10			1	0					1		10,00					
	2 02 01 02 02	Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan di luar negeri	Media	15	3,000,000,000	1,431,168,000	2	462,397,000		-			2	462,397,000	13.33	15.41				
	2 02 01 02 03	Pusat Informasi Pariwisata	Tersedianya operasional pusat informasi pariwisata	TIC	10	774,000,000	263,616,000	1	28,900,000		39,300,000			1	68,200,000	10.00	8.81				
	2 02 01 02 04	Analisis Sektor Pariwisata	Jumlah dokumen Analisis Sektor Pariwisata	Dokumen	1	500,000,000	84,000,000	-	-		-			0	-	0.00	0.00			Indikator dicapai pada akhir semester	
Rata-rata capaian kinerja (%)																7.78	8.07				
Predikat Kinerja																Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)				
2.02	2 02 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA	Indeks Kepuasan Wisatawan terhadap Industri Kepariwisata	Skala	3,00			0	0							0,00					
			Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Bersertifikat	%	14,10	1,779,380,000	1,209,216,000	0	205,200,000	0	347,892,192				553,092,192	0,00	31,08	DISPAR		Indikator program dicapai di akhir tahun	
			Jumlah Pekerja pada Industri Pariwisata dalam Promosi terhadap Total Pekerja	%	2,25			0	0							0,00					
	2 02 01 03 03	Pembinaan wajib sertifikasi kompetensi pariwisata	Jumlah peserta yang disertifikasi	orang	500	572,700,000	368,900,000	200	-		-			200	-	40,00	0,00				
	2 02 01 03 05	Sertifikasi kompetensi bidang pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang ikut uji kompetensi	orang	500	456,680,000	497,500,000	200	-	100	257,500,000			300	257,500,000	60,00	56,39				
	2 02 01 03 06	Pengawasan wajib sertifikasi kompetensi pariwisata	Jumlah tenaga kerja yang diawasi	orang	4,800	750,000,000	342,816,000	#####	205,200,000		90,392,192			4500	295,592,192	93,75	39,41				
Predikat Kinerja																64.58	31.93				
Predikat Kinerja																Rendah (R)	Sangat Rendah (SR)				
2.02	2 02 01 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif	Rupiah	875,000,000			0	0					-		0,00					
			Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha	189			0	0					-		0,00					
			Peresentase Pelaku Ekonomi Kreatif berbasis IPTEK	%	100	4,450,000,000	391,356,750	0	29,730,000	0	24,500,000			-	54,230,000	0,00	1,22	DISPAR			
			Jumlah Kesepakatan Pentaheliks dalam Pembangunan Ekosistem Ekonomi Kreatif	MoU	5			0	0					-		0,00					

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANG GUNG JAWAB	KET
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13
	2 02 01 04 03	Festival Seni Pertunjukan	Jumlah pelaku seni yang ikut berpartisipasi	Kelompok	60	2,000,000,000	0		-		-					0	0	0.00	0.00		
	2 02 01 04 07	Koordinasi Kemitraan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah kerjasama Pentahelix	Dokumen	5	600,000,000	0		-		-					0	0	0.00	0.00		
	2 02 01 04 08	Pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi	Orang	375	850,000,000	245,000,000		-		-					0	0	0.00	0.00		
	2 02 01 04 13	Pengelolaan UPT Event Kepariwisata	Jumlah pelaksanaan event-event kepariwisataan Kota Makassar	Event	60	1,000,000,000	146,356,750	3	29,730,000	2	24,500,000					5	54,230,000	8.33	5.42		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																	<b>2.08</b>	<b>1.36</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																	<b>Sangat Rendah (SR)</b>	<b>Sangat Rendah (SR)</b>			
2.02	2 02 01 50	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>25</b>		<b>25</b>					<b>50</b>		<b>50.00</b>				
			<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>2,237,834,000</b>	<b>2,643,152,500</b>	<b>25</b>	<b>583,340,600</b>	<b>25</b>	<b>422,839,098</b>				<b>50</b>	<b>1,006,179,698</b>	<b>50.00</b>	<b>44.96</b>	<b>DISPAR</b>		
			<b>Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>25</b>		<b>25</b>				<b>50</b>		<b>50.00</b>					
	2 02 01 50 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Pelayanan Rekening Telepon, Listrik & Air Kantor	Jenis	3	28,800,000	220,200,000	4	45,795,362		27,003,501		-	-	4	72,798,863	133.33	252.77			
	2 02 01 50 03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya bahan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	12	120,000,000	33,316,000		-	12	16,658,000		-	-	12	16,658,000	100.00	13.88			
	2 02 01 50 04	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah Tenaga Kontrak	Orang	42	504,000,000	648,000,000	35	148,500,000		166,500,000		-	-	35	315,000,000	83.33	62.50			
	2 02 01 50 05	Penyediaan bahan bacaan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	Terbitan	8	25,000,000	23,856,000	8	2,900,000		3,580,000		-	-	8	6,480,000	100.00	25.92			
	2 02 01 50 06	Pengelolaan administrasi perkantoran	Tersedianya bahan- bahan pengelolaan admiinstrasi perkantoran	Bulan	12	890,000,000	623,056,500	3	36,150,000	3	140,473,000		-	-	6	176,623,000	50.00	19.85			
	2 02 01 50 07	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi pelaksanaan perjalanan dinas jumlah tenaga kerja	Kali	85	650,000,000	1,035,000,000	38	348,584,488	7	45,200,572		-	-	45	393,785,060	52.94	60.58			
	2 02 01 50 09	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	jumlah tenaga kerja yang mendapat jasa jaminan sosial	Orang	42	20,034,000	59,724,000	35	1,410,750		23,424,025		-	-	35	24,834,775	83.33	123.96			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																	<b>86.13</b>	<b>79.92</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																	<b>Tinggi (T)</b>	<b>Tinggi (T)</b>			
		<b>PROGRAM</b>	<b>Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>			<b>25</b>		<b>25</b>				<b>50</b>		<b>50.00</b>					



NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13
2.02	2 02 01 51	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	%	100	1,409,000,000	701,439,460	25	30,857,400	25	310,726,300					50	341,583,700	50.00	24.24	DISPAR	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pakaian Dinas ASN Perangkat	%	100			25		25					50		50.00				
	2 02 01 51 02	Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer	Unit	10	150,000,000	130,750,000		-	16	129,662,400				16	129,662,400	160.00	86.44			
	2 02 01 51 03	Pengadaan meja dan kursi kerja/ rapat	Jumlah pengadaan meja dan kursi kerja/ rapat	Unit	94	120,000,000	45,262,500		-	11	45,262,500				11	45,262,500	11.70	37.72			
	2 02 01 51 04	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah pengadaan alat komunikasi	Unit	1	35,000,000	21,503,160		-	1	20,100,000				1	20,100,000	100.00	57.43			
	2 02 01 51 05	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan	Unit	1	42,000,000	27,556,450	1	2,704,800		12,564,800				1	15,269,600	100.00	36.36			
	2 02 01 51 06	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah kendaraan dinas	Unit	25	427,500,000	264,292,350	25	28,152,600		63,152,600				25	91,305,200	100.00	21.36			
	2 02 01 51 07	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah pendingin ruangan / AC yang dipelihara	Unit	20	32,000,000	30,000,000		-	21	15,000,000				21	15,000,000	105.00	46.88			
	2 02 01 51 08	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah komputer dan laptop yang dipelihara	Unit	30	30,000,000	25,000,000		-	30	10,000,000				30	10,000,000	100.00	33.33			
	2 02 01 51 09	Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat	Jumlah meja dan kursi kerja/rapat yang dipelihara	Unit	45	16,500,000	10,000,000		-		-				0	0	0.00	0.00			
	2 02 01 51 10	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung	1	150,000,000	100,000,000		-		-				0	0	0.00	0.00			
	2 02 01 51 12	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah STNK kendaraan dinas yang dibayarkan	Unit	26	15,500,000	14,000,000		-		-				0	0	0.00	0.00			
	2 02 01 51 13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik	Jenis	12	110,000,000	33,075,000		-	12	14,984,000				12	14,984,000	100.00	13.62			
	2 02 01 51 14	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen	Aplikasi	1	150,000,000	0		-		-				0	0	0.00	0.00			
	2 02 01 51 15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Pasang	161	130,500,000	0		-		-				0	0	0.00	0.00			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																	<b>59.75</b>	<b>25.63</b>			
<b>Predikat Kinerja</b>																	<b>Rendah (R)</b>	<b>Sangat Rendah (SR)</b>			
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>						<b>8,521,552,710</b>	<b>1,598,575,000</b>	<b>1,372,707,590</b>						<b>2,971,282,590</b>							
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																	<b>40.72</b>	<b>26.55</b>			
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																	<b>Sangat Rendah (SR)</b>	<b>Sangat Rendah (SR)</b>			

\* **Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :**

1. Komitmen Kepala Dinas Pariwisata dalam mencapai peningkatan kinerja angka kunjungan wisatawan

\* **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Beberapa program dan kegiatan seperti indeks kepuasan dan pembenahan sarana kepariwisataan masih dalam proses sehingga kinerja belum dapat di ukur
2. Wabah/Pendemi Global COVID 19 menyebabkan dilaksanakan Refocussing anggaran sehingga banyak kegiatan dikurangi bahkan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIAT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)			REALISASI KINERJA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2020)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2020 (%)		SKPD PENANG GUNG JAWAB	KET
								I		II		III		IV							
					K	Rp. (RENJA)	Rp. (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	4.a	5			6		7		8		9		10 = 6+7+8+9		11 = 10/5 * 100%		12	13

\*Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

1. Kegiatan harus dapat terus dioptimalkan dalam upaya Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata

\*Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

1. Program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan Dinas Pariwisata

Disusun,

Makassar, 2020

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MAKASSAR**

Dievaluasi,

Makassar, 2020

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA MAKASSAR**

**Ir. Hj. Rusmayani Madjid, M.SP**  
Nip. 19650305 199010 2 001

(\_\_\_\_\_)

**RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2021**

## KETERANGAN

WARNA	KODE	KOLOM	BARIS
■	: ORGANISASI	- A - D	- 30
■	: FUNGSI	- E	- 31
■	: SUB FUNGSI	- F	- 32
■	: URUSAN	- G	- 33
■	: BIDANG URUSAN	- H	- 34
■	: PROGRAM	- I	
■	: KEGIATAN	- J	
■	: SUB-KEGIATAN	- K	

KODE										URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021			LOKASI	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET	
KODE ORGANISASI	FUNGSI / SUB FUNGSI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA													
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)							
3-26	0-0	0-0	01																			
3-26	0-0	0-0	01	7																		
3-26	0-0	0-0	01	7	02																	
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3																
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26															
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01														
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	12 Bln	623,056,500	APBD	Makassar	12 Bln	654,209,325	APBD	Makassar	DISPAR	Pengelolaan Administrasi Perkantoran
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Jenis	220,200,000	APBD	Makassar	3 Jenis	231,210,000	APBD	Makassar	DISPAR	Listrik, Telepon, dan Air
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	30 Unit	14,000,000	APBD	Makassar	31 Unit	14,700,000	APBD	Makassar	DISPAR	STNK Mobil & Motor
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	36 Orang	648,000,000	APBD	Makassar	36 Orang	680,400,000	APBD	Makassar	DISPAR	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor/Teknis Lainnya
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bln	33,316,000	APBD	Makassar	12 Bln	34,981,800	APBD	Makassar	DISPAR	Tenaga Kebersihan dan Alat Kebersihan
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	33,075,000	APBD	Makassar	10 Jenis	34,728,750	APBD	Makassar	DISPAR	Alat Listrik
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8 Media	23,856,000	APBD	Makassar	8 Media	25,048,800	APBD	Makassar	DISPAR	Koran
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	81 Kali	875,500,000	APBD	Makassar	92 Kali	919,275,000	APBD	Makassar	DISPAR	Perjalanan Dinas
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	16 Unit	130,750,000	APBD	Makassar	17 Unit	137,287,500	APBD	Makassar	DISPAR	Komputer
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Unit	21,503,160	APBD	Makassar	1 Unit	22,578,318	APBD	Makassar	DISPAR	AC dll
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	12 Buah	45,262,500	APBD	Makassar	12 Buah	47,525,625	APBD	Makassar	DISPAR	Pengadaan Meja Kursi Kerja Rapat
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	100,000,000	APBD	Makassar	1 Unit	105,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Kantor DISPAR
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 Unit	27,556,450	APBD	Makassar	1 Unit	28,934,273	APBD	Makassar	DISPAR	Mobil KADIS
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	26 Unit	264,292,350	APBD	Makassar	27 Unit	277,506,968	APBD	Makassar	DISPAR	Mobil dan Motor
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	30 Unit	25,000,000	APBD	Makassar	30 Unit	25,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pemeliharaan Komputer
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	21 Unit	30,000,000	APBD	Makassar	22 Unit	31,500,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pemeliharaan AC
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	45 Unit	10,000,000	APBD	Makassar	47 Unit	10,500,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pemeliharaan Kursi, Meja

KODE										URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021			LOKASI	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET	
KODE ORGANISASI		FUNGSI / SUB FUNGSI		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN								TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)								
										Penyelenggaraan Pendaftan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Jasa Jaminan Sosial	36 Orang	59,724,000	APBD	Makassar	36 Orang	59,724,000	APBD	Makassar	DISPAR	Jamsostek	
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	4 Jenis	159,500,000	APBD	Makassar	4 Jenis	167,475,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pakaian kerja, Diklat dan Bintek	
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	131 Pasang	109,500,000	APBD	Makassar	136 Pasang	114,975,000	APBD	Makassar	DISPAR	
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	5 Diklat	50,000,000	APBD	Makassar	26 Diklat	52,500,000	APBD	Makassar	DISPAR	Diklat Keuangan & Perencanaan
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	LAMA KUNJUNGAN WISATA	3	1,797,604,000	APBD	Makassar	3	1,744,684,000	APBD	Makassar	DISPAR		
										PAD SEKTOR PARIWISATA	300 Milyar	330 Milyar										
										JUMLAH KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA YANG DIKELOLA SECARA TERPADU	1	1										
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang dikelola	7	690,320,000	APBD	Makassar	8	500,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang dikembangkan	1	690,320,000	APBD	Paropo	1	500,000,000	APBD	Kodingareng keke	DISPAR	Pembangunan Fasilitas Pariwisata di DTW
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang dikelola	2	998,084,000	APBD	Makassar	2	1,124,684,000	APBD	Makassar	DISPAR		
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kota Makassar yang diadakan dan mendapat pemeliharaan	12 Bln	924,684,000	APBD	Paropo	12 Bln	924,684,000	APBD	Anjungan Pantai Losari	DISPAR	UPT Losari
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang dilaksanakan	3	73,400,000	APBD	Lakkang Untia dan Lantebung	6	200,000,000	APBD	Samalona, Laelae	DISPAR	Pembnetukan Kelompok Sadar Wisata
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Makassar yang ditetapkan	1000	109,200,000	APBD	Makassar	1000	120,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota Makassar yang disediakan	13	109,200,000	APBD	Makassar	13	120,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pengawasan dan Pemantauan Industri Pariwisata
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	KUNJUNGAN WISATAWAN DOMESTIK	5,500,000	1,778,784,000	APBD	Makassar	5,940,000	4,070,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
										KUNJUNGAN WISATAWAN MANCA NEGARA	120,000	126,000										
										KONTRIBUSI PARIWISATA TERGADAP PDRB	2,3%	2,4%										
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang dipasarkan	58	1,778,784,000	APBD	Makassar	58	4,070,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri yang mendapat penguatan	5 Media	694,168,000	APBD	Makassar	15 Media	1,500,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pengembangan Promosi Pariwisata
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kota Makassar yang difasilitasi	8 Kegiatan	737,000,000	APBD	Makassar	15 Kegiatan	2,000,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Elsebisi DN dan LN
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	1 Dokumen	347,616,000	APBD	Makassar	1 Dokumen	570,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pusat Informasi dan Analisis Sektor
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAD SEKTOR EKONOMI KREATIF	20%	391,356,750	APBD	Makassar	25%	2,500,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
										PERSENTASE KENAikan NILAI PRODUKSI EKONOMI KREATIF	25%	30%										
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	04	2.01	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Kota yang disediakan	8	391,356,750	APBD	BENTENG ROTTRDAM	12	2,500,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	1 Prasarana	391,356,750	APBD	ANJUNGAN MANDAR	2 Prasarana	2,500,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA YANG MENDAPAT SERTIFIKASI	30%	1,209,216,000	APBD	Makassar	35%	2,320,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
										PERSENTASE SDM EKONOMI KREATIF YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	20%	25%										
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapat peningkatan kapasitas Tingkat Dasar	1000	1,209,216,000	APBD	Makassar	1200	2,320,000,000	APBD	Makassar	DISPAR		
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan	400	368,900,000	APBD	Makassar	700	700,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Pembinaan Wajib Sertifikasi Kompetensi Pariwisata
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang dilaksanakan	20%	342,816,000	APBD	Makassar	25%	900,000,000.00	APBD	Makassar	DISPAR	Pengawasan Wajib Sertifikasi Kompetensi Pariwisata
3-26	0-0	0-0	01	7	02	3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang disertifikasi kompetensi	400	497,500,000	APBD	Makassar	600	720,000,000	APBD	Makassar	DISPAR	Sertifikasi Kompetensi Bidang Pariwisata

KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021			LOKASI	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KET
KODE ORGANISASI	FUNGSI / SUB FUNGSI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET INDIKATOR	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>TOTAL</b>						<b>8,521,552,710</b>				<b>14,142,269,358</b>				

Makassar, Juni 2020  
Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

**Jr. Hj. Rusmayani Madiid, MSP**  
NIP.19650305 199001 2 001